

**Asesmen Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandar  
Lampung Tahun 2006 - 2015  
(Komparasi 2 Periode Walikota)**

*Ferry Aryadi*

*Jurusan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah  
Universitas Lampung*

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2006 - 2015 yaitu dengan melakukan komparasi 2 periode walikota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari badan pusat statistik Propinsi Lampung dengan jumlah *time series* sebanyak 10 tahun selama periode 2006 - 2015 dan menggunakan alat analisis *One Way Anova*. Hasil estimasi menunjukkan Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata kinerja keuangan berupa rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung belum berhasil meningkatkan kinerja keuangannya. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu berupa kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat periode II lebih tinggi dibandingkan periode I. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian terdapat perbedaan signifikan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I.

**Key words:** Kinerja Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat, Komparasi

## PENDAHULUAN

Indonesia memasuki masa otonomi daerah sejak tahun 1999 yang ditandai dengan diterapkannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah, diharapkan masyarakat di daerah mampu

menikmati demokrasi dengan memilih kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) secara langsung serta semakin meratanya pembangunan maupun optimalisasi potensi dan keanekaragaman tiap daerah dengan tujuan bagi kesejahteraan masyarakat.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan otonomi daerah pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu penting yang sangat mungkin bagi setiap daerah mendinamisir kegiatan pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah (Yustika 2007). Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002 dalam Batafor, 2011).

Oates (1993) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan melaksanakan desentralisasi fiskal dan penyelenggarannya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), karena pemerintah daerah (*local government*) akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pernyataan tersebut didukung oleh Mahmudi (2010), yang mengungkapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah (kinerja keuangan daerah) menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula (Sularso dan Restianto, 2011). Analisis kinerja keuangan pada APBD (*audited*) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan berupa rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan keuangan (Mahmudi, 2010). Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah secara transparan,

efisien, efektif dan akuntabel oleh setiap pemerintah daerah

APBD memiliki fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007). Pengelompokan belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok belanja langsung dan kelompok belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan ekonomi di Lampung. Kota Bandar Lampung dipimpin oleh walikota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilihan kepala daerah secara

langsung demi melaksanakan demokrasi dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari program-program kerja yang direncanakan dan direalisasikannya. Dalam 1 dekade terakhir, Kota Bandar Lampung telah dipimpin oleh Walikota hasil pesta demokrasi yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada tahun 2005 dengan periode jabatan pemerintahan tahun 2006 s.d. 2010 dan hasil pilkada tahun 2010 dengan periode jabatan pemerintahan tahun 2011 s.d. 2015. Pergantian kepala daerah tentunya akan berdampak pada penentuan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah guna melayani penduduk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya waktu dan perkembangan zaman. Berdasarkan data jumlah penduduk yang dirilis BPS Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2005 sebanyak 809.860 jiwa dan hingga tahun 2017 diketahui jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.015.910 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung per Jenis Kelamin Tahun 2005 – 2017  
No.

no	Tahun	Jenis Kelamin (jiwa)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Penduduk (Jiwa)
1	2005			411.220	398.640	809.860
2	2006			423.423	421.185	844.608
3	2007			409.433	402.700	812.133
4	2008			414.938	407.942	822.880
5	2009			420.685	412.832	833.517
6	2010			445.959	435.842	881.801
7	2011			450.802	440.572	891.374
8	2012			456.620	446.265	902.885
9	2013			475.039	467.000	942.039
10	2014			484.215	476.480	960.695
11	2015			493.411	485.876	979.287
12	2016			502.418	495.310	997.728
13	2017			511.371	504.539	1.015.910

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2019

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran (TA) 2006 sampai dengan 2015 telah merealisasikan APBD dari sisi belanja yang diharapkan meningkatnya pelayanan publik serta

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah Kota Bandar Lampung selama TA 2006 s.d. 2015 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2006 – 2015

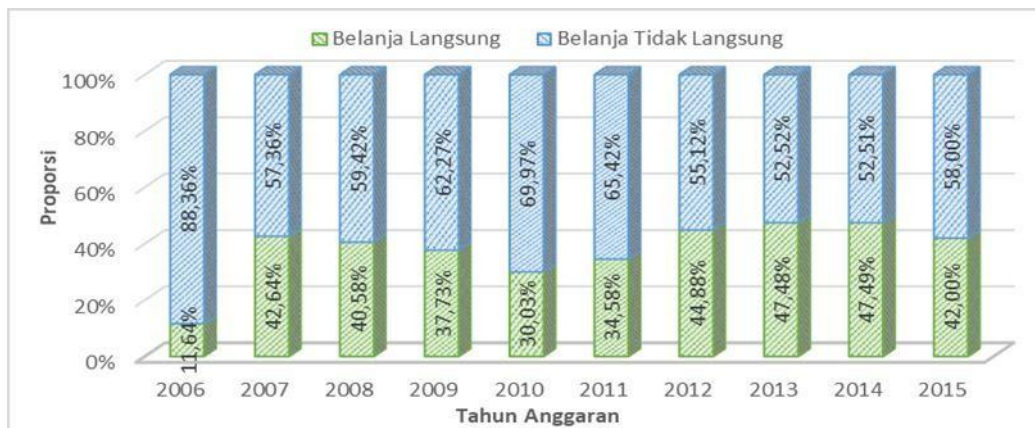
Tahun Anggaran	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	Proporsi	
				Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2006	65.757.761.765,63	499.230.830.882,00	564.988.592.647,63	11,64%	88,36%
2007	278.414.536.115,00	374.542.246.490,13	652.956.782.605,13	42,64%	57,36%
2008	316.059.385.868,00	462.718.128.184,53	778.777.514.052,53	40,58%	59,42%
2009	302.667.431.385,00	499.428.199.977,29	802.095.631.362,29	37,73%	62,26%
2010	278.758.117.709,00	649.412.523.772,58	928.170.641.481,58	30,03%	69,98%
2011	399.266.378.195,40	755.362.215.539,44	1.154.628.593.734,84	34,58%	65,42%
2012	657.523.994.710,96	807.464.932.172,92	1.464.988.926.883,88	44,88%	55,12%
2013	844.990.112.937,84	934.869.752.330,01	1.779.859.865.267,85	47,47%	52,52%
2014	854.625.165.231,08	944.850.740.184,20	1.799.475.905.415,28	47,49%	52,51%
2015	738.129.793.503,34	1.019.290.069.731,94	1.757.419.863.235,28	42,00%	58,00%

Sumber : LKPD Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah merealisasikan belanja langsung/pelayanan publik secara fluktuatif dari total APBD yang ada dari TA

2006 s.d. 2015. Lebih jelasnya proporsi belanja langsung dan tidak langsung tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Grafik Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015



Sumber : LKPD Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa porsi jumlah belanja langsung lebih rendah dibandingkan dengan porsi belanja tidak langsung. Porsi jumlah belanja langsung awalnya mengalami kenaikan namun kembali ke trend menurun sampai dengan tahun anggaran 2010 yang kemudian meningkat kembali hingga komposisi tertinggi yang terjadi pada tahun anggaran 2013 dan 2014 yaitu sebesar 47,48% dan 47,49% dibanding dengan belanja tidak langsung. Selain dilihat dari grafik porsi

belanja langsung dan porsi belanja tidak langsung tersebut, kinerja pemerintah daerah dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007).

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007) yaitu rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan keuangan. Tabel 3 berikut adalah hasil perhitungan atas rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015.

Tabel 3. Hasil Perhitungan atas Rasio Keuangan Untuk Mengukur Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2006 – 2015

Tahun Anggaran	Rasio Efektivitas PAD	Rasio Efisiensi Belanja	Rasio Belanja Publik	Rasio Belanja Aparatur	Rasio Pertumbuhan
2006	97,14%	93,43%	82,56%	10,87%	44,53%
2007	98,33%	94,10%	39,69%	53,39%	11,93%
2008	111,98%	99,69%	40,46%	59,23%	12,31%
2009	97,81%	94,54%	35,67%	58,86%	6,08%
2010	103,00%	96,81%	29,11%	67,82%	20,87%
2011	103,84%	97,37%	33,72%	63,79%	23,86%
2012	102,20%	96,08%	43,15%	52,99%	22,86%
2013	86,27%	94,48%	44,87%	49,64%	15,69%
2014	79,69%	91,62%	43,53%	48,13%	8,74%
2015	51,69%	77,22%	32,43%	44,79%	0,41%

Sumber : LKPD Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum rasio keuangan untuk mengukur akuntabilitas Pemerintah Kota Bandar Lampung secara umum mengalami fluktuasi dari

tahun ke tahun. Lebih jelasnya rasio keuangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Grafik Rasio Keuangan Untuk Mengukur Akuntabilitas Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015



Sumber : LKPD Kota Bandar Lampung TA 2006 s.d. 2015 (diolah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa rasio keuangan menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 2006 - 2015. Besarnya belanja langsung, belanja tidak langsung, dan kinerja keuangan tersebut diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pembangunan manusia yang dapat dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah IPM yang diukur melalui kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Melalui peningkatan indikator tersebut diharapkan akan

terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (<https://quickonomics.com>, 2019). Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi tercapainya tertib sosial. Berikut data perkembangan IPM Kota Bandar Lampung tahun 2006 s.d. 2016 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2006 - 2016

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Pengeluaran Riil / kapita disesuaikan (Rp.000)	IPM
1	2006	69,40	9,60	97,90	10.049,00	70,06
2	2007	69,82	9,89	97,86	10.065,78	70,57
3	2008	70,13	9,89	97,86	10.149,86	71,11
4	2009	70,50	9,91	98,44	10.178,90	71,57
5	2010	70,21	9,91	98,44	10.208,56	71,11
6	2011	70,23	10,18	98,47	10.281,58	72,04
7	2012	70,24	10,30	98,50	10.429,20	72,88
8	2013	70,26	10,30	98,78	10.617,86	73,93
9	2014	70,55	10,85	99,07	10.701,67	74,34
10	2015	70,65	10,87	98,69	11.090,21	74,81
11	2016	70,75	10,88	99,23	11.266,00	75,34

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2019 (diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa angka IPM Kota Bandar Lampung sejak tahun 2006 sampai dengan 2016 mengalami trend positif. IPM Kota Bandar

Lampung dihitung berdasarkan tahun dasar 2010. Namun jika diperhatikan dengan lebih seksama, perubahan IPM Kota Bandar Lampung sejak tahun

2006 - 2016 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan IPM tersebut di dukung oleh meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), dan standar hidup yang di ukur dengan Pengeluaran Riil / kapita disesuaikan.

Perubahan IPM mengindikasikan naiknya produktivitas perekonomian, kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup, sehingga tingkat pendapatan juga mengalami kenaikan. Kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga perekonomian juga mengalami pertumbuhan yang dapat ditunjukkan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah, dimana PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mempunyai peranan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan serta menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Capaian angka PDRB Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. PDRB Perkapita Kota Bandar Lampung Tahun 2006 – 2016

No.	Tahun	PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku (Rp)	PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan (Rp)
1	2006	9.919.913,14	20.603.830,20
2	2007	12.960.510,16	22.892.129,75
3	2008	16.564.744,56	24.159.347,05
4	2009	20.477.084,14	25.284.654,77
5	2010	25.413.394,52	25.413.394,52
6	2011	27.910.909,23	26.734.213,02
7	2012	30.739.097,67	28.136.091,42
8	2013	32.770.590,18	28.792.775,88
9	2014	36.771.142,45	30.224.132,32
10	2015	40.262.886,16	31.526.569,64
11	2016	44.843.789,39	32.933.858,23

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Perkapita Kota Bandar Lampung sejak 2006 sampai dengan 2016 mengalami trend peningkatan berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya, dalam hal ini BPS menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar untuk data PDRB tahun 2006- 2016, hal ini karena pada tahun 2010 kondisi perekonomian stabil. Realisasi APBD diharapkan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tidak terlepas dari pengelolaan yang tepat oleh kapala daerah.



Walikota Bandar Lampung sebagai pimpinan daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola dan memajukan Kota Bandar Lampung. Perencanaan strategis sangat vital, karena disanalah akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Betapapun besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya bila Bupati/Walikota tidak cermat mengelolanya. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Sejak tahun 2005 sampai 2015, telah terjadi pergantian Walikota Bandar Lampung yang juga disertai dengan perubahan sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung makin meningkat. Pergantian tampuk pimpinan di Kota Bandar Lampung tersebut cukup menarik untuk dievaluasi untuk melihat apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak, tentunya dengan berbagai perubahan yang menyertainya.

Menurut Budiarto (2007) untuk melihat keseriusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dengan membandingkan besarnya realisasi belanja publik yang diperuntukkan bagi pembelanjaan, pemeliharaan fasilitas umum dan pelayanan kepada masyarakat terhadap total belanja daerah antar berbagai periode kepemimpinan dan peraturan yang ditetapkan.

Penelitian tentang kinerja keuangan daerah di Indonesia dan kesejahteraan masyarakat (IPM) telah banyak dilakukan, di antaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan kecenderungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011) yaitu terkait dengan evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, diperoleh hasil bahwa kinerja keuangan tidak berbeda signifikan pada tingkat rasio kemandirian dan rasio efektivitas dengan hasil perhitungan terdapat peningkatan, namun hasil perhitungan atas rasio efisiensi dan keserasian belanja terjadi penurunan pada periode I dibanding periode II. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nirwana, Taufeni, dan Vince (2014) yang melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu atas 2 periode kepemimpinan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio kemandirian serta rasio efektivitas pendapatan asli daerah Periode I dan II. Sedangkan terhadap rasio belanja, rasio keserasian belanja aparatur dan rasio keserasian belanja pelayanan publik pada Periode I dan II disimpulkan tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka

harapan hidup (AHH), lama sekolah, angka melek huruf, dan standar hidup layak (SHL) antara periode I dan II.

Penelitian ini merupakan replikasi yang merupakan studi kasus yang mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah yakni di Kota Bandar Lampung. Periode penelitian ini mengacu pada dua masa pemerintahan Kepala Daerah, yaitu periode I yang dipimpin oleh ES dan periode II periode yang dipimpin oleh HHN. Hal ini untuk melihat keseriusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama dua periode pemerintahan. Pada penelitian ini, periode yang diberlakukan yaitu periode I dari tahun 2006-2010 dan periode II dari tahun 2011-2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2006 - 2015 yaitu dengan melakukan komparasi 2 periode walikota

## METODOLOGI

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data *time series* dari tahun 2006-2015 serta data:

1. Rasio efektivitas keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen. Mahmudi (2007)

menyatakan bahwa secara sederhana rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

2. Rasio efisiensi keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen. Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa rasio efisiensi diukur dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

3. Rasio keserasian belanja:
  - a) Rasio Keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Menurut Utama (2015) rasio keserasian belanja aparatur/belanja tidak langsung tersebut diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur/BTL} = \frac{\text{Realisasi Belanja Aparatur/BTL}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

- b) Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung  
Rasio keserasian belanja pelayanan publik/belanja langsung diukur dengan membandingkan realisasi belanja publik dengan anggaran belanja daerah dalam satuan persen. Menurut Utama (2015) rasio belanja aparatur pelayanan

publik/belanja langsung tersebut diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik/BL} = \frac{\text{Realisasi Belanja Publik/BL}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

4. Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) diukur dengan membandingkan pendapatan tahun *t* dengan pendapatan tahun *t-1*. Menurut Mahmudi (2010), rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia yang dapat dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup

(<https://quickonomics.com>, 2019). Berikut persamaan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru menurut BPS (2015):

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengetahuan}}} \times 100$$

1) Kesehatan dan harapan hidup  
 Cara penghitungan AHH di Indonesia masih secara manual menggunakan aplikasi *Mortpak Lite*, yang membutuhkan seluruh data usia maksimum dari bayi atau warga

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Usia harapan tersebut dapat ditemukan dari rumus rata-rata usia kematian bayi. Berikut persamaan untuk menghitung Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) menurut BPS (2015):

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

2) Pengetahuan/Tingkat pendidikan masyarakat. Dimensi pengetahuan atau pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan :

a) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. (BPS, 2015).

b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (*Mean Years of Schooling - MYS*) diukur dengan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (BPS, 2015).

Berikut persamaan untuk menghitung dimensi pengetahuan/pendidikan menurut BPS (2015):

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$r = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad \text{tahun } (t-1)$$

c) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf (AMH) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Keterangan:

AMH<sub>t</sub> 15 = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf tahun ke-t

P<sub>t</sub> 15 = jumlah penduduk usia 15 pada tahun ke- t

Angka Buta Huruf (ABH) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ABH_{15+}^t = \frac{BH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Keterangan:

ABH<sub>t</sub> 15 = jumlah penduduk usia 15 yang buta huruf pada tahun ke-t

P<sub>t</sub> 15 = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun ke-t

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dalam satuan rupiah. Berikut adalah rumus menghitung PDRB:

$$PDB \text{ per kapita} = \frac{PDB}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$$

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$$

Kegunaan angka PDRB per kapita yaitu PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

## 2. Analisis One-Way ANOVA (Anova Satu Arah)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat uji statistik yaitu analisis varians. Menurut Hakim (2002), analisis varians merupakan uji hipotesis rata-rata lebih dari dua populasi. Analisis varians yang digunakan dalam penelitian ini adalah One- Way ANOVA (Anova Satu Arah). One-Way ANOVA biasa dikenal dengan nama *one-factor completely randomized design of Anova* adalah uji hipotesis beda rata-rata atau lebih dari dua populasi jika setiap anggota yang terlibat dalam pengukuran bebas untuk terletak di populasi mana saja, artinya tidak ada kesenjangan untuk mengatur letak suatu anggota dalam suatu populasi tertentu (sehingga disebut *completely randomized*).

Ilhamzen (2013) menyatakan bahwa Uji Anova satu arah (*One Way Anova*) adalah jenis uji

statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Yang dimaksud dengan satu arah adalah sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah yaitu antar perlakuan (*Between Group*).

Ho :  $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \dots = \mu_k$  (rata-rata dari semua kelompok sama)

Ha :  $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$  (terdapat rata-rata dari dua atau lebih kelompok tidak sama)

Berikut adalah asumsi uji Anova satu arah:

- a. Setiap periode data masing-masing dipilih secara acak.
- b. Gugus setiap periode data masing-masing berdistribusi normal.

### PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji *One Way Anova* yang tersedia pada *software SPSS 25.00 for Windows*, membandingkan variabel kinerja keuangan, IPM, dan PDRB pada periode I dan periode II di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Nilai signifikansi yang digunakan pada ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau tingkat kepercayaan 95%, dengan menggunakan uji 2 arah, sehingga  $\alpha/2$  yaitu  $5\%/2 = 0,025$ . Nilai *F* tabel diperoleh dengan cara menentukan *dk* pembilang dan *dk* penyebut. *Dk* pembilang = kelompok sampel - 1, *dk* penyebut = jumlah sampel - kelompok sampel. Dimana pada penelitian ini menggunakan 2 kelompok sampel, yaitu periode I dan periode II dengan jumlah sampel sebanyak 10, sehingga *dk* pembilang =  $2-1 = 2$ , dan *dk* penyebut =  $10-2 = 8$ , dengan uji 2 arah yaitu  $\alpha$  sebesar 0,025 diperoleh nilai *F* tabel sebesar 7,571. Tahapan pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut:

1. Perbedaan Kinerja Keuangan berupa rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II
2. Hasil uji *One Way Anova* perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II ditunjukkan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji *One Way Anova* Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Pada Periode I dan Periode II

	Fhitung	Ftabel	Signifikansi	Kesimpulan
Rasio Efektivitas PAD	0,012	7,571	0,915 > 0,025	Menerima H0
Rasio Efisiensi	0,173	7,571	0,689 > 0,025	Menerima H0
Rasio Keserasian Belanja Aparatur	0,030	7,571	0,867 > 0,025	Menerima H0
Rasio Belanja Pelayanan Publik	1,858	7,571	0,210 > 0,025	Menerima H0
Rasio Pertumbuhan Keuangan	0,465	7,571	0,514 > 0,025	Menerima H0

Sumber: output SPSS, lampiran 4

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi untuk Rasio Efektivitas PAD sebesar 0,915, Rasio Efisiensi sebesar 0,689, Rasio Keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung sebesar 0,867, Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung sebesar 0,210, dan Rasio Pertumbuhan Keuangan sebesar 0,514.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semua nilai signifikansi lebih besar dari  $>$  nilai signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,025 dan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ . Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji *One Way Anova*, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak dan ( $H_0$ ) diterima, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_1$ ) tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara periode I dan periode II.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan pemerintah Kota dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kota Bandar Lampung di periode II mengalami penurunan dibandingkan dengan periode I, perbedaan penurunan tersebut tidak

signifikan terhadap perbedaan kinerja keuangan antara periode I dan periode II. Penurunan efektivitas di periode II, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung belum berhasil meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah secara signifikan. Realisasi pendapatan tersebut dibawah jumlah yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam APBD.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa rasio efektivitas PAD tidak berbeda signifikan antara periode I dan periode II, rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bandar Lampung periode I tergolong dalam kategori sangat efektif, sedangkan efektivitas realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II termasuk dalam kategori kurang efektif. Jumlah realisasi PAD pada periode II secara jumlah mengalami peningkatan dibanding periode I dikarenakan pada TA 2011 terdapat pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pada TA 2012 juga terjadi peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota yang cukup besar namun masih kurang efektif

jika melihat rasio efektivitasnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II lebih cenderung mengandalkan pendanaan

dari pihak luar dibandingkan dengan pendanaan dari diri sendiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Batafor (2011) yang meneliti tentang evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara periode pemerintahan, namun secara rata-rata pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Lembata - Provinsi NTT selama tahun 2002- 2009 sangat efektif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2008) juga menyatakan bahwa daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Bali pada periode 2002-2006 masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif dan sangat efektif serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif.

Rasio efisiensi dimaksudkan untuk menilai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rasio efisiensi antara periode I dan periode II. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II berada di kategori kurang efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I maupun periode II

cenderung merealisasikan hampir seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan, dengan kata lain, Pemerintah Kota Bandar Lampung cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih sangat kurang efisien dan belum sepenuhnya mengindahkan azas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki kecenderungan selalu ingin mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Batafor (2011) yang meneliti tentang evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT, yang menyatakan bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi pemerintah Kabupaten Lembata - Provinsi NTT tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa periode pemerintahan. Selama tahun 2002-2009 tingkat efisiensi pemerintah Kabupaten Lembata - Provinsi NTT kurang efektif. Penelitian ini juga didukung oleh Dasilva (2001) yang meneliti tentang evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 1993-1998, dengan menggunakan Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan APBD

Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Manggarai dikategorikan kurang efisien terbukti dengan rasio efisiensi ketiga kabupaten tersebut berkisar antara 95,94–97,39 persen.

Rasio Keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung menggambarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur secara optimal sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh seluruh aparaturnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung pada periode I, tetapi perbedaan penurunan tersebut tidak signifikan terhadap perbedaan kinerja keuangan antara periode I dan periode II.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung baik pada periode I maupun periode II berada pada kategori cukup serasi. Walaupun pada periode II tingkat keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkat dari periode I sebesar 50,04% menjadi 51,87% pada periode II.

Peningkatan tingkat keserasian Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung

pada periode II disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja Belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung dibanding dengan anggarannya sehingga jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak awal telah memiliki komitmen untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan belanja aparatur. Peningkatan alokasi dana belanja pelayanan aparatur tidak signifikan dibanding dengan alokasi dana pada pos-pos belanja langsung, yang manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Batafor (2011), yang meneliti tentang evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan keserasian belanja aparatur antara beberapa periode pemerintahan. Selama tahun 2002-2009 tingkat keserasian belanja Aparatur/Belanja Tidak Langsung berada pada predikat cukup serasi.

Rasio Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung menggambarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keserasian belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami



penurunan dibandingkan dengan tingkat keserasian belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung pada periode I, tetapi perbedaan peningkatan tersebut tidak signifikan terhadap perbedaan kinerja keuangan antara periode I dan periode II.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I berada pada kategori cukup serasi, sedangkan pada periode II berada pada kategori kurang serasi. Pada periode II Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung menurun dari periode I sebesar 45,50% menjadi 39,54% pada periode II.

Penurunan tingkat keserasian belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja daerah secara keseluruhan seperti belanja untuk pelayanan publik yang jumlahnya tidak signifikan. Pemerintah Kota Bandar Lampung memang sejak awal telah memiliki komitmen yang tinggi untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun Pemerintah Kota Bandar Lampung belum meningkatkan alokasi dana melalui APBD untuk belanja pelayanan publik. Menurut Batafor (2011), hal ini terjadi karena realita yang terjadi ketika pemerintah meningkatkan alokasi dana belanja pelayanan publik manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Batafor (2011), yang meneliti tentang evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT, yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan keserasian belanja antara beberapa periode pemerintahan. Selama tahun 2002-2009 tingkat keserasian belanja berada pada predikat cukup serasi.

Rasio pertumbuhan keuangan menggambarkan pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan keuangan pada periode I, tetapi perbedaan penurunan tersebut tidak signifikan terhadap perbedaan kinerja keuangan antara periode I dan periode II.

Penurunan tingkat pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode II disebabkan oleh belum optimalnya realisasi

pendapatan setiap tahun. Rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Sehingga ketika terjadi penurunan pertumbuhan keuangan maka dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan dimasa lalu adalah rendah.

Halim (2008) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi pada pemerintahan Kota Bandar Lampung. Rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan penurunan dari periode I ke periode II namun masih dalam rasio

yang positif dimana hal ini berarti bahwa peningkatan total pendapatan daerah setiap tahun diikuti juga oleh semakin tingginya realisasi belanja, sehingga pertumbuhan keuangan walau positif, tidak terlalu signifikan. Artinya bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu secara baik mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya yang dapat dilihat dari trend pertumbuhan yang makin menurun, khususnya pada periode II.

Perbedaan IPM yang berupa kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Hasil uji *One Way Anova* perbedaan IPM yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II ditunjukkan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Hasil Uji *One Way Anova* Perbedaan IPM Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II

	Fhitung	Ftabel	Signifikansi	Kesimpulan
Angka Harapan Hidup	4,326	7,571	0,071 > 0,025	Menerima H0
Rata-rata Lama Sekolah	20,844	7,571	0,002 < 0,025	Menolak H0
Angka Melek Huruf	10,722	7,571	0,011 < 0,025	Menolak H0
Pengeluaran Riil / kapita disesuaikan	16,442	7,571	0,004 < 0,025	Menolak H0
Indeks Pembangunan Manusia	37,691	7,571	0,000 < 0,025	Menolak H0

Sumber: output SPSS, lampiran 4

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui nilai Signifikansi untuk Angka Harapan Hidup sebesar 0,071 > 0,025, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata angka harapan hidup untuk periode I

dan periode II tersebut adalah tidak berbeda secara signifikan, sedangkan untuk nilai signifikansi Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,002, Angka Melek Huruf sebesar 0,011, Pengeluaran Riil / kapita disesuaikan sebesar 0,004, dan nilai gabungan untuk IPM sebesar

0,000. Semua nilai signifikansi lebih kecil dari  $<$  nilai signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,025 dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji *One Way Anova*, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_2$ ) diterima dan ( $H_0$ ) ditolak, disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ( $H_2$ ) terdukung. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Pengeluaran Riil / kapita disesuaikan, dan IPM pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung antara periode I dan periode II.

Angka harapan hidup masyarakat di Kota Bandar Lampung dapat diartikan sebagai rata-rata umur masyarakat yang dicapai selama tahun-tahun yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan hidup masyarakat di Kota Bandar Lampung semakin bertambah pada periode II dibandingkan dengan periode I, namun tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II.

Apabila dilihat secara rata-rata Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode I adalah sebesar 70,18 tahun, sedangkan rata-rata Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami peningkatan menjadi 70,49 tahun.

Menurut Batafor (2011), angka harapan hidup identik dengan derajat

kesehatan masyarakat yang tercermin lewat umur panjang dan hidup sehat. Tantangan pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan investasi di bidang pendidikan, sehingga hasil dari pendidikan semakin berkualitas dan meningkatkan investasi dalam bidang kesehatan. Langkah ini lebih berarti bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung, karena dengan adanya kesehatan murah dan fasilitas pendidikan yang lengkap akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat Kota Bandar Lampung menjadi lebih sejahtera.

Rata-rata lama sekolah masyarakat menunjukkan jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal. Dengan kata lain rata-rata lama sekolah memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung yang dapat mengenyam dunia pendidikan sehingga dampaknya adalah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode I adalah selama 9,96 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami peningkatan menjadi 10,64 tahun. Hal ini berarti bahwa jumlah masyarakat

yang telah mengenyam dunia pendidikan semakin meningkat pada periode II dibandingkan dengan periode I, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Hal ini berarti jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan di bangku sekolah semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011), yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lembata

- Provinsi NTT pada berbagai periode pemerintahan. Menurut Batafor (2011), dengan memperoleh pendidikan yang memadai, maka akan mempengaruhi peningkatan kemampuan dasar manusia seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial politik dan aspek kehidupan lainnya, serta mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan, yaitu dibutuhkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bandar Lampung, sehingga tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung dapat meningkat.

Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan kata lain angka melek huruf memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung yang dapat membaca dan menulis sehingga dampaknya adalah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa rata-rata angka melek huruf Masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode I adalah sebesar 98,21%, sedangkan rata-rata angka melek huruf Masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami peningkatan menjadi 98,85%. Hal ini berarti bahwa jumlah masyarakat yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat pada periode II dibandingkan dengan periode I, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Hal ini berarti jumlah masyarakat yang mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Batafor (2011), yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan pendidikan masyarakat di Kabupaten Lembata – Provinsi NTT pada berbagai periode pemerintahan. Pengeluaran riil/kapita disesuaikan menunjukkan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*) masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan di Kota Bandar Lampung pada periode I adalah sebesar Rp10.176.940,00, sedangkan rata-rata Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan di Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami peningkatan menjadi Rp10.820.990,00. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan masyarakat di Kota Bandar Lampung semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode II dibandingkan dengan periode I, dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan tersebut bermakna terhadap perbedaan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung antara periode I dan periode II. Peningkatan Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan masyarakat di Kota Bandar Lampung jelas dipengaruhi oleh pendapatan domestik regional bruto yang berasal dari sektor- sektor perekonomian produktif yang ada, seperti kegiatan perdagangan dan jual beli barang, usaha pertanian misalnya

sayur-sayuran, buah-buahan, berternak dan budi daya hasil laut yang dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

Peningkatan Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan masyarakat di Kota Bandar Lampung juga menjelaskan bahwa terjadi pemerataan pendapatan dan peningkatan tingkat daya beli dan adanya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Pembangunan manusia dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah IPM yang diukur melalui kesehatan dan harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup (<https://quickonomics.com>, 2019). Indikator kesehatan dan harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, pendidikan mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator standar hidup digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata IPM di Kota Bandar Lampung pada periode I adalah sebesar 71,28, sedangkan rata-rata IPM Kota Bandar Lampung pada periode II adalah sebesar 74,26. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa IPM di Kota Bandar Lampung semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I, peningkatannya masih sama-sama dalam kategori IPM tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode II dibandingkan dengan periode I, dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan tersebut signifikan terhadap perbedaan kesejahteraan masyarakat di Kota bandar Lampung antara periode I dan periode II. Jika dihubungkan dengan Tabel 2.2 kriteria IPM yaitu mengacu kepada BPS (2019), rata-rata IPM pada periode I dan

periode II tergolong dalam kategori IPM tinggi.

3. Perbedaan PDRB Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II

Hasil uji *One Way Anova* perbedaan PDRB yang berupa PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II ditunjukkan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil Uji *One Way Anova* Perbedaan PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II

	Fhitung	Ftabel	Signifikansi	Kesimpulan
PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan	24,787	7,571	0,001 < 0,025	Menolak H0

Sumber: output SPSS, lampiran 4

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dapat diketahui nilai Signifikansi untuk PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan sebesar 0,001. Nilai Signifikansi lebih kecil dari < nilai signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,025 dan nilai Fhitung > Ftabel. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji *One Way Anova*, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H3) diterima dan (H0) ditolak, disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H3) terdukung. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung antara periode I dan periode II.

PDRB Per kapita berdasarkan harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung pada periode I adalah sebesar Rp24.896.747,82, sedangkan rata-rata PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung pada periode II mengalami peningkatan menjadi Rp30.322.685,50. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada periode II dibandingkan dengan periode I, dan

dapat disimpulkan bahwa peningkatan tersebut bermakna terhadap perbedaan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung antara periode I dan periode II. Peningkatan PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung jelas menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata kinerja keuangan berupa rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung belum berhasil meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu berupa kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode

II. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat periode II lebih tinggi dibandingkan periode I. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung pada periode I dan periode II. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa PDRB Per kapita Berdasarkan Harga Konstan Kota Bandar Lampung semakin meningkat di periode II dibandingkan dengan periode I.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan untuk lebih memperhatikan Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung. Karena berdasarkan hasil penelitian, Kinerja Keuangan daerah tidak berbeda signifikan.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan untuk lebih memperhatikan alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik

melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga ke depannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.
4. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan agar mampu meniru dan menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja, guna menekan jumlah pengeluaran belanja daerah yang dinilai sangat tidak efisien dan terkesan terjadi pemborosan anggaran belanja.
6. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah, penelitian ini dalam melakukan uji beda menggunakan uji Anova, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat uji yang

lain seperti regresi dengan variabel independennya adalah variabel dummy periode I dan periode II, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

7. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel dalam penelitian ini hanya Kota Bandar Lampung, sedangkan di Provinsi Lampung terdapat 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung dengan melakukan perbandingan untuk keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih jelas mengenai gambaran kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

#### **DAFTAR PUSTKA**

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Jakarta.
- Barr, Nicholas. 1998. *The Economics of the Welfare State*. California: Stanford University Press
- Batafor, Gregorius Gehi. 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT*.
- Baujard, Antoinette. 2013. *Welfare Economics*. GATE Groupe



- d'Analyse et de Théorie Économique Lyon-St Étienne
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Dasilva, Petrus. 2001. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka "Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta"(tidak dipublikasikan).
- Diana, Heny F. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 No. 8 Hal. 193 -229*.
- Dewi, Retnasari, E. R. N. A. 2015. Pengaruh Nilai Tukar Petani Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3).
- Doane, D. P., and Seward, L. E. 2011. *Applied Statistics in Business & Economics*. McGraw-Hill/Irwin.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2008. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002 - 2006. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Undip.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ginting, CharismaK.S., Irsad Lubis dan Kasyful Mahalli. 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Vol 04, No. 01. Wahana Hijau.
- Hakim, Abdul. 2002. *Statistik Induktif Untuk Ekonomi & Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba. Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Book review. Salemba Empat. Jakarta.
- Heriningsih, Suchyo dan Marita. 2013. Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa). *Buletin ekonomi Vol.11,No.1, hal 1- 86*.
- Ilhamzen. 2013. *Statistika Parametrik Part 5 Uji ANOVA Satu Arah (One-Way ANOVA) Menggunakan Program SPSS, Free Learning, (Online)*, <http://freelearningji.wordpress.com>, diakses 16 Juni 2019.
- Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada

- Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9 No. 1, Juni 2004 Hal: 47 – 6.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Lugastoror, Decta Pitron. 2013. *Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Mahmudi. 2010. *Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi kedua, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. dalam Suyana, Utama
- M. 2007. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2006*. Studi Kasus Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. (tidak dipublikasikan).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga. Jakarta.
- Mardismo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Matheus A.B.H. Dacosta. 2002. *Kemandirian Kota Kupang Ditinjau dari Aspek Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29*.
- Nirwana, Ema, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati. 2014. *Evaluasi kinerja keuangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis*. *Jurnal SOROT* Vol 9 No 1 April, hal 1 – 121.
- Nugraha, dan Tia Amelia. 2017. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011 – 2014*. *Jurnal Wacana Kinerja*, Volume 20, Nomor 1. Juni 2017. Bandung.
- Nyoman S., Ni Made SU, dan I.N. Mahaendra Yasa. 2015. *Dampak Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6 (3): 167181.
- Oates, W. E. 1993. *Fiscal decentralization and economic development*. *National tax journal*, 46(2), 237-243.
- Paul A. Samuelso and William D. Nordhaus. 1998. *Macroeconomics Sixteenth Edition*. Boston: Irwin/McGraw-Hill, hal. 315-316.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun

- 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Petrus, Dasilva. 2001. Perbandingan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sikka dan Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Tesis S2 (tidak dipublikasikan)
- Pigou, A. C. 1962. *The economics of welfare*. MacMillan, London, 1920. 4ème édition, 1932.
- Putry, et. al. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JRMB, Volume 12, No. 1, Juni 2017*
- Rizky Amalia, Firda dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keceragaman Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, *E-Jurnal EP Universitas Udayana Vol. 3, No.6, Juni 2014, Bali*.
- Soemardi. 2010. Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. *Bee Media Indonesia, Bandung, hlm 225*.
- Suharto, edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Agustus, halaman 109-124*.
- Sularso, Sri. 2003. *Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta. BPFE
- Tarmizi, Rosmiyati, dan Khairudin. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.5, No.2, September, Halaman 71-90*.
- Utama et. al. 2015. Pengaruh PDRB, Belanja Modal Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks. Karesidenan Besuki). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. Desentralisasi Ekonomi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Rent-seeking. *Jurnal Transisi, Vol. 1, No. 1, Mei*.